

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Konflik pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkarak menunjukkan bahwa penolakan masyarakat bukan ditujukan terhadap konsep energi terbarukan, melainkan terhadap praktik komunikasi pembangunan yang belum mampu mengakomodasi pengalaman, pengetahuan, dan ruang hidup masyarakat lokal. Temuan penelitian mengungkap bahwa masyarakat memaknai pembangunan melalui pengalaman historis terhadap proyek-proyek sebelumnya, sehingga narasi pembangunan yang dibangun oleh negara tidak diterima sebagai kebenaran yang bersifat tunggal. Dengan demikian, konflik yang terjadi merupakan bentuk kontestasi makna antara kepentingan pembangunan nasional dengan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.
2. Praktik Public Relations PT PLN Indonesia Power sebagai representasi komunikasi pemerintah lebih didominasi oleh pola komunikasi pembangunan yang bersifat top-down konsultatif dalam membangun legitimasi proyek melalui narasi energi terbarukan, pembangunan berkelanjutan, dan kepentingan nasional. Meskipun telah dilakukan berbagai bentuk sosialisasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, penelitian ini menemukan bahwa proses komunikasi masih lebih berorientasi pada penyampaian informasi dan pembentukan legitimasi dibandingkan membangun dialog yang setara. Akibatnya, komunikasi belum sepenuhnya mampu menciptakan kepercayaan, rasa memiliki, dan penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan.
3. Melalui perspektif dekonstruksi, penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat merupakan bentuk komunikasi kritis yang mengungkap adanya relasi kuasa, ideologi, dan krisis legitimasi dalam komunikasi pembangunan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Critical Public Relations dan komunikasi pembangunan dengan menempatkan pembangunan sebagai arena negosiasi makna antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi pembangunan tidak hanya diukur dari tersampainya informasi atau terlaksananya sosialisasi, tetapi

juga dari kemampuan membangun ruang dialog yang partisipatif, adil, dan menghargai pengetahuan lokal sebagai bagian dari proses pembangunan.

5.2 Saran

1. Bagi PT PLN Indonesia Power dan pemerintah, praktik komunikasi pembangunan perlu ditransformasikan dari pendekatan yang berorientasi pada penyampaian informasi menuju komunikasi yang lebih dialogis, partisipatif, dan kolaboratif. Masyarakat perlu dilibatkan secara bermakna dari perencanaan termasuk dengan metode komunikasi bersama *niniak mamak* di Minangkabau etika nya memang *batanyo ka mamak* dengan teknik mengunjungi satu persatu untuk membulatkan pemikiran sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap sosialisasi, sehingga proses pembangunan memperoleh legitimasi sosial yang lahir dari kepercayaan, transparansi, dan kesepahaman bersama.
2. Bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta mekanisme komunikasi dan praktik PR yang lebih adaptif terhadap karakteristik sosial dan budaya masyarakat lokal. Pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga legislatif sejak awal proses perencanaan diharapkan mampu meminimalkan konflik, memperkuat pengambilan keputusan yang partisipatif, serta menciptakan komunikasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan yang turut bertanggung jawab dalam mengambil peran yang jelas dalam memposisikan diri.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian komunikasi pembangunan kritis pada proyek-proyek strategis nasional lainnya dengan memperluas perspektif teoritis maupun metodologis, seperti analisis wacana kritis, etnografi komunikasi, atau studi partisipatif. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas strategi Public Relations dalam membangun legitimasi sosial pada proyek pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat memperkaya pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang *Critical Public Relations*, komunikasi pembangunan, dan komunikasi kebijakan.